



Keukeuh Tak Terapkan WFH bagi ASN

Ngeyel, Bupati Harda Punya Kebijakan Beda

SLEMAN - Pemerintah pusat menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) satu hari seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dilakukan setiap hari Jumat demi efisiensi energi dalam menghadapi konflik global. Meski demi-

kian, Pemkab Sleman memiliki kebijakan berbeda. Bupati Sleman Harda Kiswaya menjelaskan, perintah itu dia hormati. Hanya saja di wilayah kabupaten, khususnya Sleman, pelayanan tidak akan optimal.

Baca Keukeuh... Hal 7



Kantongi SE Mendagri, Penerapan Minggu Depan

PEMROV DIJ telah mengantongi surat edaran (SE) dari menteri dalam negeri (mendagri) terkait kebijakan *work from home* (WFH). Saat ini Pemprov tengah melakukan kajian dan menar-

getkan kebijakan tersebut bisa diterapkan pekan ini. "Kalau bisa minggu ini, tapi kalau mungkin lebih *settle* ya minggu depan. Nggak tergesa-gesa gitu."

Baca Kantongi... Hal 7

BERBAGAI KEBIJAKAN

PEMERINTAH PUSAT

- Pemerintah pusat menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) satu hari seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dilakukan setiap hari Jumat demi efisiensi energi dalam menghadapi konflik global.

PEMROV DIJ

- Saat ini Pemprov tengah melakukan kajian dan mengartikan kebijakan tersebut bisa diterapkan pekan ini.

SLEMAN

- Tetap melakukan pelayanan seperti biasa.

JOGJA

- Penekanan efisiensi yang akan diterapkan di pemkot adalah membangun kesadaran bersama. Khususnya untuk tidak terlalu sering menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak di tengah ancaman krisis seperti sekarang.

BANTUL

- Pemkab Bantul akan menerapkan kebijakan *work from home* (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, mulai minggu kedua di bulan April.

KULON PROGO

- Kebijakan *work from home* (WFH) resmi diberlakukan. Pemkab Kulon Progo segera menyusun skema penerapan WFH. Tujuannya memaksimalkan WFH, bukan sebagai ajang liburan ASN.



Grafik: Heri Kartunegara Jogja

Keukeuh Tak Terapkan WFH bagi ASN

Sambungan dari Hal 1

Apalagi jika ada masalah akan tetap melakukan pelayanan seperti biasa. Kalau di Sleman WFH itu pelayanan nggak bisa optimal. Banyak pertimbangan kami untuk melayani seperti biasa," katanya saat ditemui awak media di Kompleks Pemkab Sleman, Rabu (1/6).

Harda mengaku sudah melakukan dialog dengan organisasi perangkat daerah. Hasilnya tidak ada sektor yang

memungkinkan untuk WFH. Paling mungkin hanya dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo).

Hanya saja jika diterapkan pada satu instansi saja, terjadi ketidakmerataan kebijakan. Baginya, semua ASN bertugas untuk melayani masyarakat. Pria asal Kapanewon Godean ini menyebut, keputusan tidak WFH ini juga tidak dipermasalahkan oleh ASN di Bumi Sembada.

Dia mengklaim hal ini tidak akan mengganggu kesejahteraan dan kinerja mereka. "Nuwun sewu, saat perintah ini diturunkan mungkin secara umum saja dilihat pelayanan. Tapi di wilayah enggak

dipertimbangkan," tambahnya. Sementara soal penghematan bahan bakar minyak (BBM), dia menegaskan tidak akan secara serampangan langsung mengurangi kuota sebagai bentuk kehati-hatian. Strateginya adalah dengan melakukan peninjauan dahulu untuk tiap-tiap agenda.

Jika memang kegiatannya tidak diperlukan, maka tidak dilakukan. Kebijakan ini dia yakin akan terjadi efisiensi dengan sendirinya. "Betul-betul BBM sebagai napasnya kegiatan itu agar bisa mendukung agenda dengan baik," katanya.

Disinggung soal kemungkinan arahan penggunaan transportasi umum, dia mengaku belum

ada. Harda menilai ini belum memungkinkan karena ketersediaan transportasi umum yang belum mendukung.

Begitu juga dengan penggunaan sepeda yang dia nilai berpotensi menyulitkan bagi ASN yang jarak rumahnya jauh dengan kantor Pemkab Sleman. "Sepeda ya yang suka saja. Kalau rumahnya Cangkringan setiap hari ke sini, ya bagaimana," tambahnya.

Pakai Sepeda hingga Batasi BBM Mobnas

Pemkot Jogja bersiap menghadapi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) imbas konflik Timur Tengah. Sejumlah skenario efisiensi mulai

disiapkan jika nantinya ada arahan dari pemerintah pusat untuk diterapkan.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, penekanan efisiensi yang akan diterapkan di pemkot adalah membangun kesadaran bersama. Khususnya untuk tidak terlalu sering menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak di tengah ancaman krisis seperti sekarang.

"Kami mendorong penggunaan sepeda atau sepeda listrik karena jauh lebih efisien," ujar Hasto saat ditemui di Balai Kota Jogja, Selasa (31/3).

Mantan bupati Kulon Progo itu menegaskan, penggunaan sepeda juga bisa diaplikasikan kepada para siswa sekolah untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Sebab, sudah ada imbauan dari Kemendikbudristek agar siswa berjalan kaki atau bersepeda.

Hasto menilai di Kota Jogja jarak antara rumah siswa dengan sekolah juga tidak terlalu jauh. Namun ada opsi lain

dengan menyiapkan mobil *shuttle* untuk penjemputan siswa pada titik-titik tertentu.

Dua kebijakan itu dinilai tidak hanya menghemat BBM. Namun juga mendorong keterbukaan dan penegakan aturan larangan penggunaan sepeda motor ke sekolah.

"Kami ingin mengondisikan agar mereka (siswa sekolah) tidak boros BBM dan lebih tertib," kata Hasto.

Ia juga menyiapkan skema plafonisasi BBM untuk kendaraan dinas di Pemkot Jogja. Implementasinya dengan pembatasan jatah BBM. Mobil dinas (mobnas) hanya diberikan jatah lima liter per hari, sementara sepeda motor dinas satu liter hari.

Hasto yakin, skenario itu akan efektif untuk menghemat anggaran BBM hingga 30 persen. Sekaligus membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga keluar wilayah tugas. Karena jika melebihi plafon, maka anggaran BBM wajib di-

tanggung pribadi oleh pengguna kendaraan.

"Selama ini banyak mobil dinas yang digunakan untuk keperluan jauh hingga keluar seperti ke Bantul, Kulon Progo, atau Sleman," ungkapnya.

Sementara itu, Baharuddin Kamba, salah satu orang tua siswa di Kota Jogja menilai imbauan siswa agar berjalan kaki atau bersepeda merupakan kebijakan positif. Namun perlu diarahkan agar lebih strategis. Bahkan pejabat publik perlu memulai terlebih dahulu supaya memberikan contoh kepada masyarakat.

Kamba menilai, imbauan itu memiliki dampak baik karena menjadi bagian pola hidup sehat. Selain itu juga mengurangi polusi serta menghemat penggunaan konsumsi BBM. "Imbauan itu juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum yang lebih besar. Misalnya memperkuat penggunaan transportasi umum di Kota Jogja," katanya. (del/lnu/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005